

FRAMING MEDIA ATAS PEMBERITAAN SERTIFIKASI DAI

Abd Munib

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

munib11emdi@gmail.com

Abstract: Religious messages conveyed by extremist preachers have the opportunity to move the congregation to anti-tolerant actions that can threaten the nation and state. Based on this, the Indonesian Ulema Council (MUI) sees the need for a standardization policy in order to create enlightening lecturers. This incident did not escape the media spotlight. The media even had their own characteristics in filming the standard of dai. The news of dai's certification did not escape the media spotlight. This scientific work aims to reveal the online media framing of Tempo.co, Medcom.id, and BBC.com for reporting on dai's certification. The theory used in this research is the Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki's framing theory which classifies the structural news text on four dimensions as a framing device, namely syntax, script, thematic and rhetoric. This study uses a qualitative descriptive research method where the data will be presented in the form of a description of the results of the analysis of the news on certification from Tempo.co, Medcom.id, and BBC.com. The framing of the news carried out by the three online media shows a difference. Tempo.co framed that dai certification was seen as an important policy that MUI had to take in order to create enlightenment. As for Medcom.id, in framing MUI's policy on standardization of ulama, it emphasizes and awaits support from religious organizations such as NU and Muhammadiyah. Meanwhile, BBC.com is more concerned about the benchmarks that will be used by MUI in dai certification

Keywords: *Media Framing, News, Certification Dai.*

Abstrak: Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh dai-dai ekstrimis berpeluang menggerakkan jamaah pada tindakan-tindakan yang anti-toleran sehingga dapat mengancam pada bangsa dan negara. Berdasarkan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu adanya kebijakan standarisasi dai guna menciptakan penceramah yang mencerahkan. Peristiwa ini tidak luput dari sorotan media bahkan media memiliki ciri tersendiri dalam memframing standarisasi dai. Pemberitaan sertifikasi dai tidak luput dari sorotan media. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengungkap framing media online Tempo.co, Medcom.id, dan BBC.com atas pemberitaan sertifikasi dai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori framing Zhong Dang Pan Dan Gerald M. Kosicki yang mengklasifikasikan struktural teks berita pada empat dimensi sebagai perangkat framing yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana data akan disajikan dalam bentuk deskripsi hasil analisis terhadap pemberitaan sertifikasi dai Tempo.co, Medcom.id, dan BBC.com. Pembingkai berita yang dilakukan oleh ketiga media online tersebut menunjukkan perbedaan. Tempo.co memframing bahwa sertifikasi dai dipandang sebagai kebijakan penting yang harus diambil MUI guna menciptakan dai pencerahkan. Adapun Medcom.id dalam membingkai kebijakan MUI atas standarisasi ulama lebih menekankan dan menunggu adanya dukungan dari organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan BBC.com lebih mempersoalkan tentang tolok ukur yang akan digunakan oleh MUI dalam sertifikasi dai.

Kata kunci: Framing Media, Berita, Sertifikasi Dai

A. Pendahuluan

Pemahaman terhadap pesan-pesan Agama yang dicerna masyarakat tidak lepas dari peran tokoh agama. Artinya, pesan Agama harus disampaikan oleh tokoh Agama atau dai yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dengan begitu, pengetahuan dai tentang keagamaan harus diimbangi dengan pengetahuan kebangsaan harapannya agar pesan Agama tidak disampaikan dengan ekstrem yakni, mempertentangkan Agama dan Pancasila dan sebaliknya. Apalagi di tengah maraknya dai kondang serta sering muncul di layar kaca, berbicara soal Agama tetapi justru tidak didukung dengan pemahaman mendalam tentang keagamaan dan kebangsaan. Hal ini berpotensi mimbar-mimbar keagamaan dialih-fungsikan menjadi ruang dan tempat menyebarkan paham radikal sehingga jamaah yang datang justru bukan mendapatkan keteduhan rohani melainkan keriuhan. Padahal, mestinya dakwah Islam dipraktikkan dengan metode yang tidak ekstrim, anarkis, serta tidak menodai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.¹

Di sinilah, Negara melalui *state apparatus* merasa memiliki tanggung jawab atas munculnya da'i yang dianggap intoleran dengan menggulirkan program sertifikasi dai. Program sertifikasi dai menuai pro-kontra tersendiri di kalangan publik di Indonesia. Ada yang mendukung dengan program sertifikasi dengan alasan agar pesan-pesan keagamaan di sampaikan oleh penceramah-penceramah yang memang memiliki kompetensi keagamaan². Namun demikian, kompetensi keagamaan saja tidak cukup sehingga harus diimbangi dengan pengetahuan tentang metode dan pemahaman kebangsaan. Ada pula yang menolak terhadap program sertifikasi dai dengan alasan masyarakat sudah pandai dan cerdas dalam menentukan penceramah yang memang sudah kompeten. Alasan lain terhadap penolakan sertifikasi dai sebab dikhawatirkan Negara terlalu ikut campur dalam hal keagamaan masyarakat sebab melalui sertifikasi dai, Negara dapat mengontrol konten-konten keagamaan yang akan disampaikan oleh penceramah. Oleh karena itu, walaupun program sertifikasi ini terpaksa diprogramkan oleh pemerintah maka akan lebih bijak untuk tidak dijadikan sebagai program yang terkesan memaksakan guna tidak mendistorsi dan menghindari pengekanagan terhadap para dai.

Sebagaimana dikutip Fahrurrozi,³ menurut Zainut Tauhid Sa'adi, merespon sertifikasi khatib dengan berargumen minimal memenuhi tiga syarat. *Pertama*, program sertifikasi Khatib dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Khatib, baik dari aspek materi maupun metodologi.

¹ Inilah kemudian pentingnya pemerintah membina terlebih dahulu para ulama yang ingin berdakwa kepada masyarakat bukan memebri sanksi ulama. (Saipul Annur, "Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang," *Medina-Te* Vol. 18 No. 1 (Juni 2018).

² Azman, Z., Maulana, M. A., & Saleh, R. (2019). Strategi Humas Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam Membangun Banda Aceh sebagai Kota Pariwisata (Studi pada Dinas Pariwisata Banda Aceh). *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 2(2), 46-55.

³ Fahrurrozi, "Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respon Para Dai di Kota Mataram," *Jurnal Komunikasi* Vol. 08, No. 01 (Juni 2018).

Menurutnya, disadari atau tidak kondisi masyarakat kita tengah berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini mendorong semua orang harus beradaptasi jika ingin tetap eksis, tidak terkecuali seorang khatib dan juga dai yang memang setiap saat aktifitasnya bergulat dengan masyarakat. Jadi keharusan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam bidang penguasaan materi dan metodologi dakwah mutlak diperlukan oleh seorang khatib dan juga dai agar benar-benar dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara baik sehingga sesuai dengan kaidah *Alîmun bi zamâ nihî wa 'alîmun bi mujtamâ'ihî* (dai harus paham kondisi faktual masyarakat atau dengan bahasa lain menyesuaikan konteks dan zaman serta selaras dengan kebutuhan masyarakat).

Kedua, program tersebut bersifat *voluntary* (sukarela) bukan *mandatory* (kewajiban). Program sertifikasi Khatib, katanya, harus bersifat sukarela, bukan keharusan yang memiliki konsekuensi hukum. Melaksanakan tugas dakwah itu hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama. Kalau sertifikasi khatib diwajibkan akan sangat sulit dilaksanakan. Juga dikhawatirkan muncul kesan ada intervensi atau pembatasan oleh pemerintah. Justru hal seperti ini bisa kontra produktif. *Ketiga*, program sertifikasi idealnya diselenggarakan Ormas Islam atau masyarakat, bukan pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab menyiapkan kader-kader dakwah yang mumpuni baik dari aspek materi maupun metodologi.

Program sertifikasi dai juga tidak luput dari sorotan media online selanjutnya apabila realitas telah telah disorot oleh media maka pada umumnya sebuah realitas akan dibingkai secara berbeda. Mengenai muatan dalam berita, setidaknya terdapat dua kecenderungan mengenai bagaimana berita dimunculkan. Mark Fisherman dalam Eriyanto, sebagaimana dikutip oleh Fathan, kecenderungan dalam berita merujuk pada adanya seleksi berita yang mengindikasikan bahwa berita diproduksi berdasarkan proses seleksi ataupun pemilihan. Di lain sisi, ada kecenderungan lain yang menjelaskan bahwa berita bukan bermakna diseleksi, melainkan dibentuk dan dikonstruksi oleh wartawan.⁴ Terkait bagaimana cara berita itu disampaikan, setiap meja redaksi pers memiliki kekhasan dalam aspek kebahasaan maupun pengkonstruksian keadaan sosial yang melingkupi teks. Hal ini ditunjukkan oleh Tempo.co, Medcom.id, dan BBC.com yang menjadi objek dalam penulisan ilmiah ini. Di mana, Tempo.co dan medcom.id pada pada 21 November 2019 dan BBC.com pada 20 November memberitakan tentang sertifikasi dai yang dipromotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Penulis memilih tiga media tersebut berlandaskan bahwa Tempo.co merupakan anak perusahaan pers Tempo yang selama ini dikenal dengan media

⁴Fathan, *Analisis Wacana Kritis Berita 'Kematian Terduga Teroris Siyono' Di Harian Solopos, Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 3, No. 1 (Juni 2018).

paling kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada di tanah air. Adapun pemilihan terhadap media online Medcom.id disebabkan karena media tersebut bagian dari anak perusahaan MetroTv. Di mana, media tersebut sering menjadi media yang cenderung mendukung terhadap program yang dicanangkan pemerintah lebih-lebih salah satu pemilik saham MetroTv, Surya Paloh yang sekaligus pimpinan partai Nasional Demokrat (Nasdem), menjadi partai pendukung pemerintah era saat ini. Sedangkan pemilihan terhadap BBC.com oleh karena BBC.com adalah bagian dari Majalah Mingguan yang aktif menyoroti berita tentang realitas keagamaan. Melalui perbedaan asal-usul induk perusahaan pers ini tentu memiliki gaya masing-masing dalam membingkai pemberitaan karena itulah pemilihan terhadap ketiga media online tersebut menurut peneliti sangat menarik.

Ada banyak penelitian ilmiah tentang konstruksi realitas melalui framing yang dilakukan oleh media, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ardhina Pratiwi tentang *Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan Bbc News Model Robert N. Entman)* dan Ayub Dwi Anggoro, *Media, Politik Dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV)*. Akan tetapi, yang membedakan dalam penelitian ini adalah obyek kajian dan model analisis framing yang digunakan. Di mana keduanya menggunakan Model Robert N. Entman sedangkan penelitian ini menggunakan analisis framing Zhongdang Pan Kosicki. Meskipun ada penelitian dengan isu yang sama seperti yang dilakukan oleh Fahrurrozi tentang *Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respon Para Dai di Kota Mataram* dan Saipul Annur tentang *Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang* jelas sangat berbeda karena keduanya meneliti tentang respon terhadap sertifikasi dai sedangkan tulisan ini untuk mengetahui pembingkai yang dilakukan oleh media. Dengan demikian, Tulisan ilmiah ini berusaha melihat bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh ketiga media Tempo.co, Medcom.id BBC.com dalam membingkai pemberitaan standarisasi dai yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Media dalam Mengkonstruksi Realitas

Media masa kerap disebut dengan *the fire estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena peranan media masa sebagai institusi pembentuk opini publik serta dapat menjadi penekanan ide, gagasan dan citra sehingga bisa mempresentasikan dalam konteks yang lebih empiris.⁵ Media bisa memperjelas sekaligus mempertajam konflik atau sebaliknya: mengaburkan dan bahkan mengulemkannya. Media bisa mengkonstruksi realitas,

⁵Ardhina Pratiwi, "Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika Dan Bbc News Model Robert N. Entman)," *Thaqāfiyyāt* Vol. 19, No.1 (Juni 2018): 1.

namun juga bisa menghadirkan hiperrealitas.⁶ Hiperrealitas menggiring orang mempercayai sebuah citra sebagai kebenaran, meski kenyataannya hanya dramatisasi realitas dan pemalsuan kebenaran, yang “melampaui realitas”.⁷ Framing pada akhirnya menentukan bagaimana realitas hadir di hadapan khalayak. Apa yang diketahui khalayak tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung bagaimana media melakukan *frame* atas peristiwa itu dan memberikan pemahaman tertentu atas peristiwa tersebut. Salah satu elemen penting ketika media melakukan framing adalah keragaman media yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan satu dengan wartawan lain sehingga realitas yang terbentuk di tengah-tengah publik juga akan berbeda.

Produksi berita berhubungan dengan bagaimana rutinitas terjadi di ruang pemberitaan, yang di dalamnya melibatkan penentuan bagaimana wartawan didikte atau dikontrol untuk memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu. Selain praktik-praktik tersebut, ada satu aspek lain yang sangat penting yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa ditempatkan dalam keseluruhan produksi teks, yakni bagaimana berita itu bisa bermakna dan berarti bagi khalayak.⁸ Hal ini menjadi dalil yang jelas bahwa media turut berperan dalam mengkonstruksi realitas. Konstruksi realitas terbentuk bukan semata-mata hanya dari cara wartawan memandang realitas tetapi kehidupan politik tempat media itu berada. Sistem politik yang diterapkan di sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja media massa di suatu negara itu pada saat yang bersamaan juga mempengaruhi cara media massa tersebut mengkonstruksi realitas.

Konstruksi realitas sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter Berger bersama Thomas Luckman dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality*. Peter Berger dan Thomas Luckman menyatakan bahwa pengertian dan pemaknaan terhadap sesuatu muncul akibat adanya komunikasi dengan orang lain. Bahkan di dalamnya terdapat realitas sosial yang tidak lebih sekedar dari konstruksi sosial dalam komunikasi tertentu.⁹ Isi media, entah itu hasil liputan seperti berita atau laporan tertulis pandangan mata adalah bahasa baik berbentuk kata, angka, gambar maupun grafis. Artinya, melalui bahasa yang

⁶ Sebagaimana hasil amatan Lim yang mengatakan bahwa: didukung oleh kekuatan jaringan internet, beberapa pengguna internet yang ingin meyakinkan orang lain akan adanya konspirasi global melawan Islam dapat dengan mudah menyebarkan dan berbagi kepercayaan mereka dan identitas perlawanan kepada jutaan pengguna Indonesia lainnya. Bagi publik *cyber* Indonesia, orang-orang ini “sebenarnya” lebih berkuasa dari CNN atau BBC. Merlyna Lim, *Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet*, (Washington DC: East West Center, 2005), hlm. 36.

⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotika, Dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 170.

⁸ Ayub Dwi Anggoro, *Media, Politik Dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV)*, *Jurnal Aristo* Vol.2 No. 2 (Juli 2014).

⁹ Thomas Luckman dan Peter Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (United States: Anchor Books, 1996), hlm. 12.

disajikan oleh para pekerja atau wartawan mengkonstruksi seluruh realitas yang diliput. Dengan demikian bahasa adalah nyawa bagi media dalam menyodorkan realitas. Ada tiga tindakan yang dilakukan oleh pekerja media dalam mengkonstruksi realitas termasuk realitas penceramah¹⁰ sebagai para penyampai pesan-pesan keagamaan kepada publik. *Pertama*, pemilihan simbol (fungsi bahasa).¹¹ *Kedua*, pemilihan fakta yang disajikan (*strategi framing*). *Ketiga*, kesediaan memberi tempat (*agenda setting*).¹²

Pertama, pemilihan bahasa. Dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, para penceramah bertukar citra dan menyampaikan syariat kepada khalayak melalui simbol-simbol keagamaan. Dalam konteks ini, sekalipun pelaku media melakukan pengutipan langsung (*direct quottion*) atau menjadi seorang penceramah sebagai sumber atau nara sumber berita akan tetapi media selalu tetap terlibat baik langsung maupun tidak melalui simbol bahasa yang dipilih. Pada umumnya, setiap media memiliki stok pilihan bahasa yang banyak dan teknik tentang ungkapan yang dapat dikutip dari narasumber. Pengambilan suatu ungkapan tertentu dari narasumber tentu sudah didasarkan pada pertimbangan tertentu pula.

Apalagi manakala media dalam menciptakan *lead* atau judul berita maka pemilihan kata sebagai simbol itu sudah pasti ditentukan sendiri oleh para pelaku media. Apapun simbol yang dipilih akan mempengaruhi makna yang muncul di tengah-tengah pembaca. Dalam pandangan semiotika, teks (berita) dipandang penuh dengan tanda, mulai dari pemakaian kata-kata atau istilah, frase angka, foto dan gambar bahkan cara mengemasnya pun adalah tanda. Begitu pula dengan pemilihan nara sumber tertentu dan mengabaikan yang lain juga bagian dari tanda. Dalam semiotika, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat dapat teramati, mengacu pada hal yang dirujuknya, dan dapat diinterpretasikan adalah tanda (*sign*). Benda, peristiwa atau kebiasaan yang dapat memberikan hubungan segitiga dengan sebuah ground, denotatum, dan dengan interpretaten adalah tanda.¹³

Kedua, dalam melakukan pembingkaiian kegiatan yang berhubungan dengan dakwah. Adanya keterbatasan tempat dan halaman (pada media cetak) dan waktu (pada media elektronik), nyaris tidak ada media yang membuat peristiwa secara utuh mulai dari detik pertama kejadian hingga detik akhir. Atas nama kaidah

¹⁰ Se jauh dipahami bahwa fatwa-fatwa para juru dakwah bisa diperdebatkan, penanya-penanya yang tidak puas dapat mendekati ulama lain untuk mencari pendapat kedua atau ketiga atau keempat hingga mereka mendapat jawaban yang sesuai dengan selera yang diinginkan. Prosedur ini berpeluang membuka jalan berbagai penafsiran Islam yang baru dan pemikiran alternatif disamping penafsiran tradisional yang sudah ada. Iamemiliki peluang membuka mata kaum muslim yang terpaku kepada Islam lokal milik mereka saja kepada keragaman agama mereka dalam bentuk globalnya. Greg Fealy dan Sally White, *Ustadz Seleb Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 166.

¹¹ Alex Sobur, 2012, *Analisis Teks Media*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 102-103.

¹² Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 16.

¹³ Sudjiman dan Aart van Zoest, *Serba-Serbi Semiotika*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 5.

jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit dicoba disederhanakan melalui mekanisme pembingkaiannya fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Dalam hal kepentingan pembingkaiannya (*framing*) tersebut media seringkali menyoroiti hal-hal yang dianggap penting dari sebuah fenomena dakwah. Adapun kepentingan tersebut bisa berkaitan dengan langsung dengan pemilik media atau pihak yang memiliki relasi khusus dengan media tersebut.

Framing menjadi sebuah strategi penyusunan realitas menjadi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah wacana. Sebagaimana teori semiotik, teori *framing* juga dipakai sebagai salah satu metode untuk memahami strategi penyusunan realitas maka analisis *framing* berfungsi membongkar muatan wacana. Cara media mengkonstruksi realitas adalah dengan mengemas (*packaging*) realitas ke dalam struktur sehingga sebuah fenomena mempunyai makna. Sasaran dari analisis *framing* sebagai salah satu metode analisis untuk menemukan aturan dan norma yang terssembunyi dibalik suatu teks yang dipilih oleh para pelaku media.

Ketiga, Kesiediaan media memberi tempat pada peristiwa dakwah yang merupakan *agenda setting* suatu media. Semakin sedikit ruang yang disediakan media tentang realitas dakwah maka fenomena dakwah akan semakin luput dari perhatian masyarakat. Sebaliknya, semakin luas tempat yang disediakan media tentang realitas dakwah maka ia juga akan mendapat perhatian yang besar pula dari khalayak. Pada konteks ini, media memiliki fungsi *agenda setter* sebagaimana asumsi dasar teori *agenda setting* yakni, besarnya perhatian publik atau khalayak masyarakat terhadap sebuah isu sangat bergantung dan berkaitan dengan seberapa besar media memberikan perhatian pada isu tersebut.

Salah satu dampak dari fungsi *agenda setting* ini adalah lahirnya gambaran realitas yang menempel dalam benak masyarakat serupa dengan bagaimana media mengkonstruksinya. Analogi yang gampang adalah ketika media menggambarkan realitas sebagai warna putih maka putih pulalah yang tergambar dalam benak masyarakat. Dengan dalilnya yang terkenal "*world outside and pictures in our heads*," Walter Lippmann sudah sejak lama menyadari fungsi media sebagai pembentuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayak. Menurut Lippmann media adalah pembentuk makna (*the meaning construction of the press*) bahwasannya interpretasi media terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka.¹⁴

Bahasa dalam berita tampaknya, terwujud dalam bentuk yang memungkinkan adanya pengujian yang cukup sederhana atas kebenaran atau kebohongannya. Dengan demikian, bahasa dalam media secara keseluruhan tampil *konstatif* (proposional dan dapat dibuktikan benar salahnya) atau yang bertolak belakang dengan itu yang disebut dengan *performatif*. Dalam upaya melukiskan

¹⁴ Walter Lippmann, *Opini Umum* (terjemahan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 3-28.

kemenduaan uraian berita yang pokok, istilah *konstatif* dan *performatif* tentang suatu berita bahwa suatu peristiwa harus digubah menjaadi “kisah tentang peristiwa” dan peroses penggubahan itu melibatkan perbandingan antara dua gaya yang bertolak-belakang yaitu *performatif* yang juga interpretatif dan gaya *fabulatif* (pengisahan) dengan gaya *konstatif* yang juga merupakan gaya demonstratif dan faktual. Sehingga muncul keraguan tentang sifat penting kefaktaan maka tanpa adanya atribusi kredibilitas, menurut Smith sebagaimana dikutip McQuail, yang dimiliki khalayak berita tidak dapat dibedakan dari hiburan atau propaganda.¹⁵

Adapun kesimpulan umum dari banyak studi tentang isi berita adalah bahwa berita memperagakan pola menyeluruh yang agak stabil dan dapat diperkirakan apabila diukur dalam kaitannya dengan kualitas dan katogori konvensional dari pokok bahasan. Meskipun demikian, stabilitas isi berita seringkali agak luar biasa dan menggantungkan dukungan yang yang baik pada mereka yang berujar bahwa isi berita sangat ditentukan oleh keragaman kendala politis, ideologis, dan budaya secara intern. Pertanyaan tentang struktur berita adakalanya dikemukakan dalam hubungannya dengan “bias”. Patut diperhatikan ada unsur-unsur subjektivitas yang kuat dalam suatu pemberitaan. Obyektivitas tidak lebih dari sekadar model prosedur. Para wartawan biasanya tidak menyatakan hal-hal yang secara objektif lebih penting, signifikan, relevan dalam menyajikan berita kepada khalayak. Dalam hubungannya dengan seluruh bukti tentang regulasi isi berita sukar disangkal bahwa secara fundamental tidak ada sistem pengumpulan dan pelaporan berita yang tidak bermuatan ideologis dan politis. Laporan berita kemudian ditulis menurut kreteria berita yang lebih berpedoman pada persyaratan berita dari organisasi sendiri dan praktik rutin ketimbang acuan pada “dunia nyata” peristiwa atau hal-hal yang “sesungguhnya” diinginkan atau dibutuhkan khalayak.¹⁶

Menurut Nurudin, penyampaian teks melalui saluran komunikasi massa memiliki efek yang terwujud pada tiga hal, yaitu efek kognitif (pengetahuan), afektif (emosinal dan perasaan), dan behavioral (perubahan pada tingkah laku).¹⁷ Pemberitaan suatu peristiwa menunjukkan ada banyak sarana penting dalam menggambarkan signifikansi relatif dari peristiwa yang dilaporkan baik untuk mendulang kepentingan ekonomi politik media maupun untuk merebut pasar khalayak. Hal itu terjadi karena berkaitan dengan kerangka dasar atau pandangan tentang dunia yang mendasari pembuatan berita yang pada hakikatnya bersifat ideologis yang tersembunyi. Tatanan-tanan tersembunyi yang dapat ditemukan dalam pemberitaan adalah yang dilukiskan sebagai gerakan dari citra masyarakat yang terpilih menuju npenataan kembali melalui homogenitas minta dan perwakilan politis. Bahasa berita bersifat linier yang menguraikan laporan peristiwa di sepanjang dimensi tunggal dengan tambahan informasi, ilustrasi, dan bahasa

¹⁵ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 197.

¹⁶ McQuail, *ibid*, hlm. 193-195.

¹⁷ Nurudin, *Komunikasi Massa*, (Malang: Cespur, 2003), hal. 214-223.

kutipan. Dengan demikian, tidaklah mustahil apabila sebuah berita pada akhirnya tidak hanya mengandung konstruksi atas wacana fakta sosial, melainkan juga terpaut dengan wacana atas fakta yang dibentuk oleh media berdasarkan fakta sosial di masyarakat.¹⁸

C. Metode Analisis Zhong Dang Pan Dan Gerald M. Kosicki

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan paradigma konstruktivis. Penelitian ini akan melihat bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh ketiga media Tempo.co, Medcom.id BBC.com dalam membingkai pemberitaan standarisasi dai yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Unit amatan dalam penelitian ini adalah portal berita Tempo.co, Medcom.id BBC.com dan unit analisis dalam penelitian ini adalah berita yang dibuat oleh ketiga media online yakni, Tempo.co, Medcom.id BBC.com terkait pemberitaan tentang standarisasi dai. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemberitaan tiga media online yaitu, Tempo.co, Medcom.id BBC.com. Pengambilan data primer ini diperoleh dengan *screenshot* berita mengenai standarisasi yang dimuat dalam ketiga portal berita tersebut. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari hasil diskusi ilmiah bersama dosen dan teman-teman diskusi. Pada penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk deskripsi hasil analisis dengan menggunakan model analisis Pan dan Kosicki.

Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁹ Terdapat banyak metode dalam analisis framing dalam rangka media mengkonstruksi suatu peristiwa yang dikembangkan oleh para ahli diantaranya model Robert N. Entman, William A. Gamson, M. Edelman dan Zhong Dang Pan dan M. Kosicki. Masing masing model framing memiliki skema atau perangkat yang berbeda. Seperti Robert N. Entman yang melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isi. Framing mengarah kepada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk memasukan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.²⁰

Zhong Dang Pan Dan Gerald M. Kosicki dalam tulisan mereka "*Framing Analysis an Approach to News Discourse*" membagi menjadi 4 dimensi struktural

¹⁸Fathan, *Analisis Wacana Kritis Berita 'Kematian Terduga Teroris Siyono' Di Harian Solopos, Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 3, No. 1 (Juni 2018).

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 68.

²⁰Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta:Lkis. 2002), hlm. 222.

teks berita sebagai perangkat framing yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Dalam pendekatan ini perangkat framing dibagi menjadi 4 struktur besar.²¹

1. Struktur Sintaksis dapat diamati dari bagan berita.

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, (pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) menjadi sebuah berita. Elemen sintaksis memberi petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah pramida terbalik yang dimulai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar dan penutup. Dalam bentuk ini bagian yang diatas ditampilkan lebih penting dibanding bagian bawahnya.

2. Struktur Skrip

Struktur Skrip melihat bagaimana wartawan mengemas suatu peristiwa. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini disebabkan dua hal yaitu pertama untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa satu dengan sebelumnya, kedua untuk penghubung teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H, Who, What, When, Where, Why dan How.

3. Struktur Tematik

Struktur Tematik yaitu cara pandang wartawan atas suatu peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta ditulis dalam suatu berita.

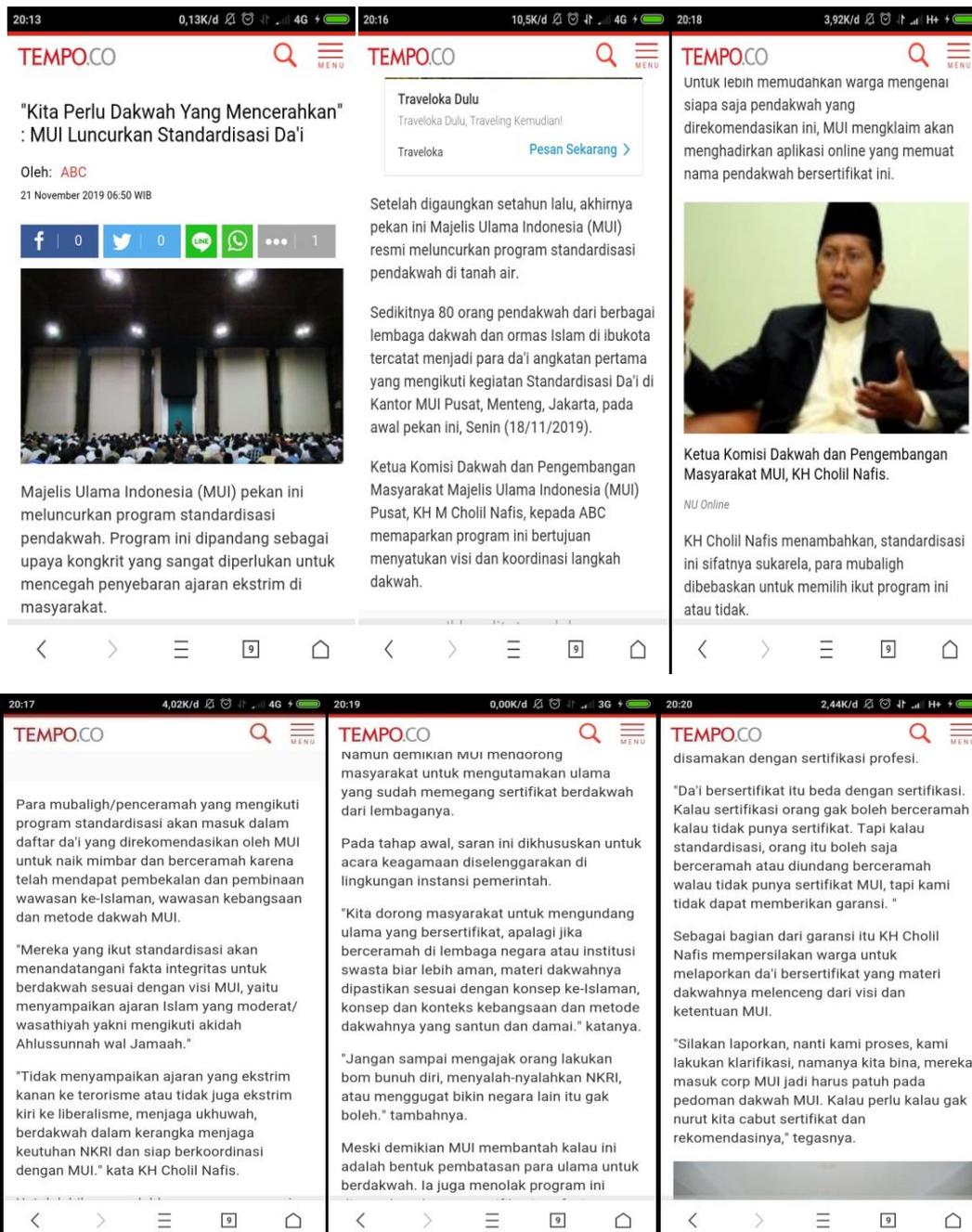
4. Struktur Retoris

Struktur Retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu yang digambarkan dari pilihan gaya atau kata. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Terdapat beberapa elemen dalam struktur retorik diantaranya leksikon, pemilihan dan pemakaian kata untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Selain melalui kata penekanan dapat dilakukan melalui grafis berupa gambar, tabel, foto dan lain-lain.

²¹*Ibid.* 293-306.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Frame Tempo.co



- Judul: "Kita Perlu Dakwah Yang Mencerahkan": MUI Luncurkan Standardisasi Dai
- Sintaksis: Judul tempo.co tersebut menggunakan tanda petik yakni, "Kita Perlu Dakwah Yang Mencerahkan" yang kemudian menjadi alasan bagi

MUI untuk meluncurkan standarisasi dai atau penceramah. Penggunaan lead ini menginformasikan bahwa masyarakat (kita) sangat membutuhkan ceramah agama yang mencerahkan. MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas tinggi dalam persoalan agama, melalui judul ini, digambarkan sebagai lembaga yang tanggap pada isu-isu yang berawal dari para penceramah dengan merancang kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi bahkan bisa meredam kekeruhan yang dapat mencemari kejernihan dalam wajah dakwah agama Islam di Indonesia dengan cara standarisasi dai. KH. M. Cholil Nafis selaku Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI menyatakan hendaknya dai tidak menyampaikan ajaran yang ekstrim kanan ke terorisme atau tidak juga ekstrim kiri ke liberalisme, menjaga *ukhuwah*, berdakwah dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam pemberitaan ini menunjukkan adanya distingsi antara sertifikasi dai dengan standarisasi dai. Hal ini merujuk pada pernyataan Cholil Nafis tentang gambaran dai bersertifikat itu berbeda dengan sertifikasi. Sertifikasi artinya dai tidak boleh berceramah kalau tidak punya sertifikat sedangkan standarisasi, orang itu boleh saja berceramah atau diundang berceramah walaupun tidak punya sertifikat MUI, tapi MUI tidak dapat memberikan garansi.

- c. Tematik: Tema pertama tentang pernyataan Cholil Nafis Para *muballig* atau yang menyatakan penceramah yang mengikuti program standarisasi akan masuk dalam daftar dai yang direkomendasikan oleh MUI untuk naik mimbar dan berceramah karena telah mendapat pembekalan dan pembinaan wawasan ke-Islaman, wawasan kebangsaan dan metode dakwah MUI. Tema kedua tentang pernyataan komisi VIII DPR RI yang membidangi isu agama dan sosial, Maman Imanulhaq, yang menyatakan bahwa di zaman media sosial seperti ini, justru orang yang tanpa pengetahuan dan keilmuan agama yang kuat serta tidak memiliki sumber referensi itu justru muncul, disukai, walaupun isi ceramahnya caci maki.
- d. Skrip: Berita ini telah memenuhi kelengkapan unsur penulisan berita 5w+1h. MUI yang diwakili oleh Cholil Nafis (who) sebagai Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI Pusat yang telah melakukan langkah-langkah nyata (what) dengan meluncurkan standarisasi dai. Pada praktiknya (how), standarisasi dai dilakukan dalam bentuk pelatihan yang diadakan

oleh MUI dengan mengikuti pelatihan yang diadakan MUI ada kelayakan yang kemudian mendapat sertifikat sebagai penceramah yang direkomendasikan MUI. Standarisasi ini dilakukan (why) sebagai upaya kongkrit yang sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran ajaran ekstrim di masyarakat. Peluncuran standarisasi ini berlangsung di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, (where) pada awal pekan ini, Senin (18/11/2019) (when).

- e. Retoris: Standarisasi dai ini digambarkan sangat penting untuk diikuti oleh para penceramah karena para *mubaligh* atau penceramah yang mengikuti program standarisasi tergolong atau masuk dalam daftar dai yang direkomendasikan oleh MUI untuk naik mimbar dan berceramah karena telah mendapat pembekalan dan pembinaan wawasan keislaman, wawasan kebangsaan dan metode dakwah MUI.

2. Frame medcom.id

The image displays two screenshots of a news article from the website medcom.id. The left screenshot shows the article's title, "MUI Pastikan NU dan Muhammadiyah Ikut Standarisasi Dai", and the MUI logo. The right screenshot shows the article's text, which states that the Majelis Ulama Indonesia (MUI) is opening certification for dai (preachers) and that organizations like Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah are expected to follow the standardization. A quote from the Chairman of the MUI Center for Challenging and Developing Society is also visible.

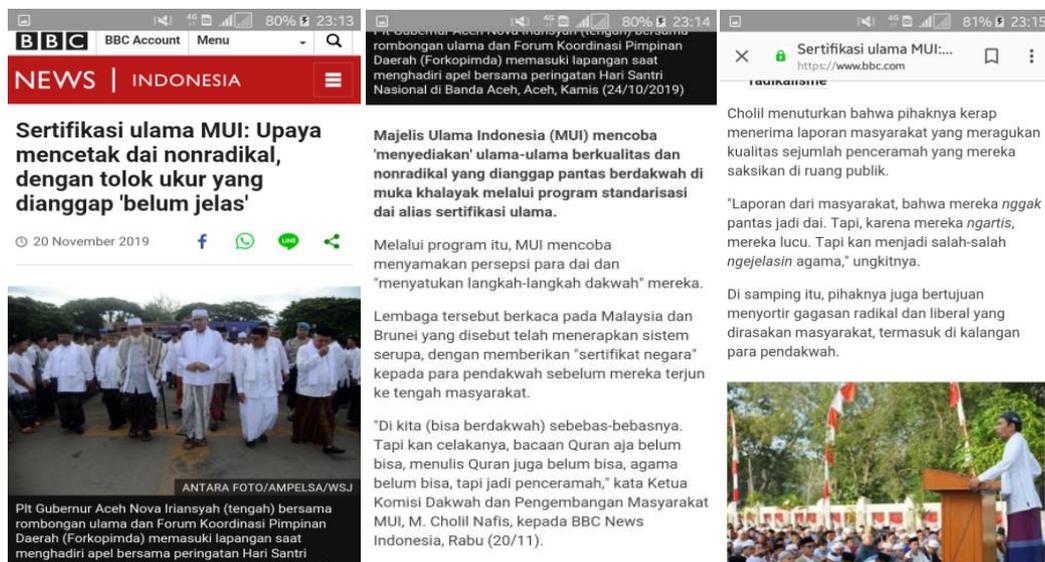


- a. Judul: MUI Pastikan NU dan Muhammadiyah Ikut Standarisasi Dai
- b. Sintaksis: Standarisasi dai yang dilakukan MUI ini digambarkan sudah pasti mendapat dukungan bahkan diikuti oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dimengerti dengan mudah yakni, melalui judul berita yang digunakan oleh media medcom.id. Penggambaran kelayakan penceramah untuk naik mimbar untuk menyampaikan pesan keagamaan atau standarisasi dai dalam media medcom.id ini dianggap sebagai kursus dai. Secara teknis ada tiga materi yang akan diberikan dalam kursus dai yakni, Islamisasi (tentang keislaman), kebangsaan, dan metode dakwah. Dengan kursus ini pula media medcom.id membingkai bahwa tidak ada perbedaan penceramah baik yang berceramah di lingkungan publik atau lingkungan pemerintah karena adanya persamaan persepsi. Persamaan persepsi ini merujuk pada pada ungkapan MUI yang diwakili Cholil Nafis yang menyatakan bahwa standarisasi dai ini tidak akan mengklasifikasikan pada penceramah pemerintah atau swasta justru semua penceramah itu semua sama. Terdapat fakta integritas yang harus dipenuhi oleh mereka (para penceramah) dan tentu mereka harus memenuhi kriteria dakwah yang digariskan MUI.
- c. Tematik: Tema pertama adalah pembingkaiian tentang organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah

pasti setuju dan mengikuti program standarisasi dai oleh MUI ini. Tema berikutnya, penyamaan persepsi untuk *tafhimul afkar* atau penyamaan pola fikir, dan *tafhimul harokah* yaitu koordinasi langkah-langkah dakwah.

- d. Skrip: Dari unsur kelengkapan berita di media medcom.id ini didominasi oleh Cholil Nafis dan standarisasi dai (unsur who dan what). Adapun pembingkaiian terhadap bagaimana (how) pelaksanaan standarisasi dai dan kapan dilaksanakan (when) serta dimana dilaksanakan (where) dilaksanakan standarisasi itu tidak dijelaskan. kepastian organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyetujui standirasasi dai juga tidak dilengkapi dengan statement-statement dari organisasi keagamaan itu.
- e. Retoris: Standarisasi dai digambarkan sebagai suatu upaya penyamaan pola fikir dan para penceramah dapat terkoordinasi aktivitas dakwahnya. Program standarisasi dai juga digambarkan sebagai program yang diminati oleh para penceramah sebagai adanya 80 dai yang mengikuti kursu standarisasi ini.

3. BBC.com



The image shows a screenshot of a BBC News article from Indonesia. The article title is "Sertifikasi ulama MUI: Upaya mencetak dai nonradikal, dengan tolok ukur yang dianggap 'belum jelas'". The article is dated 20 November 2019. The main text discusses the Majelis Ulama Indonesia (MUI) attempting to standardize the quality of preachers (dai) by issuing certificates. It mentions that MUI is trying to make the perception of preachers more uniform and to determine the steps of their preaching. The article also notes that MUI is looking at models from Malaysia and Brunei. A photo shows Governor Nova Iriansyah (center) with a group of preachers. A quote from MUI's Chairman, Cholil Nafis, is included: "Di kita (bisa berdakwah) sebeb-bebasnya. Tapi kan celaknya, bacaan Quran aja belum bisa, menulis Quran juga belum bisa, agama belum bisa, tapi jadi penceramah," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis, kepada BBC News Indonesia, Rabu (20/11).

la berharap para ulama yang mengikuti sertifikasi akan memiliki "keseimbangan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikalisme, juga tidak liberalisme".

Bagaimana cara kerja sertifikasi ulama?

Sebanyak 75 ulama telah mengikuti proses sertifikasi pada gelombang pertama Senin (18/11) lalu.

Kali itu, mereka yang hadir merupakan ulama-ulama senior yang diundang oleh MUI, seperti Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Muchlis Hanafi, hingga pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Depok Hamdan Rasyid.

Ke depannya, dai-dai yang tertarik dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi.

"Minimal bacaan Qurannya dia fasih. Yang kedua, bicara di depan umum bisa. Yang ketiga, dia memang aktif keagamaan di masyarakat," tutur Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis.

Namun, MUI mengaku masih tetap akan menyaring nama, untuk kemudian diundang melakukan sertifikasi, berdasarkan riwayat hidup para pendaftar.

"Lalu kita latih. Bisa dilatih tiga hari, bisa lima hari, bahkan bisa sebulan. Setelah itu ada tesnya di akhir," kata Cholil.

Apabila dai yang bersangkutan lulus dalam tes akhir, mereka akan memperoleh sertifikat dan wajib menandatangani pakta integritas ulama. Setelahnya, dai tersebut dapat kembali berdakwah di tengah masyarakat, tapi kali ini dengan status "direkomendasikan" MUI.

Bagaimana dengan yang tidak lulus?

"Kita nggak akan melarang orang yang nggak dapat sertifikat untuk ceramah, silakan. Cuma MUI tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap isi (ceramah) dan orangnya," ujar Cholil.

Sedangkan bagi penceramah yang sudah mendapat sertifikat, MUI mengaku akan bertanggung jawab atas kiprah dakwah mereka, bahkan berhak menegur apabila melenceng dari pakta integritas yang sudah diteken.

Bagaimana dengan yang tidak lulus?

"Kita nggak akan melarang orang yang nggak dapat sertifikat untuk ceramah, silakan. Cuma MUI tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap isi (ceramah) dan orangnya," ujar Cholil.

Sedangkan bagi penceramah yang sudah mendapat sertifikat, MUI mengaku akan bertanggung jawab atas kiprah dakwah mereka, bahkan berhak menegur apabila melenceng dari pakta integritas yang sudah diteken.

"Jika diperlukan, rekomendasinya atau sertifikatnya ditarik kembali oleh MUI."

Kekhawatiran tentang program sertifikasi ulama

Diselenggarakannya program sertifikasi ulama oleh MUI tidak lepas dari pro-kontra.

Maria Ulfah Anshor, yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, menilai urgensi program tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Pasalnya, tidak seperti jenis profesi lain yang diamban setelah melewati jenjang pendidikan formal, status keulamaan seseorang belum bisa dinilai karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

"Jika diperlukan, rekomendasinya atau sertifikatnya ditarik kembali oleh MUI."

"Sesungguhnya (status) ulama itu adalah pemberian, semacam penghargaan dari masyarakat, menyebut dia ulama karena dia punya keahlian, dia punya keilmuan yang dalam.

"Nah, siapa yang bertugas mensertifikasi keulamaan orang ini? Menurut saya disiplin pendidikannya," ujar Ulfah saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (20/11).

Pendapat Ulfah senada dengan pimpinan majelis Ar Raudhah Surakarta, Habib Novel Alaydrus, yang menilai bahwa sertifikasi ulama dapat menggunakan indikator latar belakang pendidikan yang bersangkutan.

"Jika itu memang lulusan dari pesantren, yang jelas pesantrennya, kemudian juga kalau dia punya majelis, yang jelas majelisnya, dengan tujuan untuk memberikan jaminan ke masyarakat kalau yang berbicara ini betul-betul ulama yang punya keilmuan, maka itu positif-positif saja," kata Novel.

Lebih jauh, Novel menilai semestinya MUI mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ulama.

punya majelis, yang jelas majelisnya, dengan tujuan untuk memberikan jaminan ke masyarakat kalau yang berbicara ini betul-betul ulama yang punya keilmuan, maka itu positif-positif saja," kata Novel.

Lebih jauh, Novel menilai semestinya MUI mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ulama.

Langkah kurang tepat

"Definisi ulamanya itu apa? Nggak setiap orang berbicara kan ulama. Justru yang jelas tempatnya ulama kan pesantren.

"Kalau sekarang kan liar nih, semua pada ceramah. Artis ceramah, ini ceramah, kemudian sebentar-sebentar buat pendapat di medsos misalnya, siapapun itu dan apapun itu, tapi *ndak* punya latar belakang pendidikan yang jelas," ungkapnya.

Novel sendiri tidak berencana untuk mendaftarkan dirinya ke dalam program sertifikasi tersebut.

Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Maria Ulfah Anshor, menganggap program sertifikasi ulama sebagai langkah yang kurang tepat.

"Kalau persoalannya adalah pada dai, mungkin yang lebih pas menurut saya bukan sertifikasi dai atau ulama, tapi penguatan kapasitas," kata Ulfah.

Ia menyoroti lemahnya pemahaman agama sejumlah penceramah yang tak jarang berujung pada aksi saling menyalahkan di antara mereka.

"Yang tidak boleh adalah menyensatkan pandangan kelompok lain, atau bahkan berbeda pandangan, kemudian seolah-olah yang pandangannya berbeda dengan dia (itu) salah, dan dia merasa yang paling benar, itu yang sebenarnya berbahaya," ujarnya.

Ironisnya, melalui sertifikasi, dampak itu jugalah yang ia khawatirkan justru akan terjadi.

"Jangan-jangan nanti setelah disertifikasi, lalu dia merasa semuanya dia yang paling benar, yang lain salah. Itu makin berbahaya menurut saya," pungkasnya.

- a. Judul: Sertifikasi Ulama MUI: Upaya Mencetak Dai Nonradikal, dengan Tolok Ukur yang Dianggap 'Belum Jelas'
- b. Sintaksis: Standarisasi dai dalam media BBC.com ini dikemas sebagai upaya MUI dalam menyediakan ulama-ulama berkualitas dan nonradikal. Upaya ini digambarkan sebagai tiruan dari Malaysia dan Brunei yang telah lebih dahulu “memberi sertifikat” kepada para penceramah sebelum terjun berdakwah di ruang publik sehingga tidak sembarang orang bisa berceramah. Adapun di negeri Indonesia, ceramah bebas disampaikan siapa saja bahkan oleh individu-individu yang belum bisa baca-tulis Al-Quran. Cholil Nafis Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI digambarkan kerap menerima laporan masyarakat yang meragukan kualitas sejumlah penceramah yang mereka saksikan di ruang publik oleh karena yang disampaikan tidak relevan dengan ajaran Islam. Di samping itu, standarisasi dai digambarkan sebagai upaya yang bertujuan untuk menyortir gagasan radikal dan liberal yang berdampak pada paham keagamaan masyarakat masyarakat. Standarisasi dai ini dibingkai sebagai penyeimbang agar para pendakwah tidak radikalisme juga tidak liberalisme.
- c. Tematik: Tema pertama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya menyediakan ulama-ulama berkualitas dan nonradikal serta dianggap pantas berdakwah di muka khalayak melalui program standarisasi dai. Tema kedua adalah cara kerja sertifikasi dai dimana dai yang lulus dalam tes akhir akan memperoleh sertifikat dan wajib menandatangani pakta integritas ulama. Selanjutnya dai tersebut bisa berdakwah di tengah masyarakat dengan status direkomendasikan MUI. Dengan demikian, bagi penceramah yang sudah mendapat sertifikat maka MUI mengaku akan bertanggung jawab atas kiprah dakwah mereka dan MUI berhak menegur apabila melenceng dari pakta integritas yang sudah diteken MUI. Bahkan jika diperlukan, rekomendasi atau sertifikat yang sudah diberikan kepada penceramah akan ditarik kembali oleh MUI. Tema ketiga adalah tentang langkah standarisasi dai dari MUI yang dinilai kurang tepat sehingga Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Maria Ulfah Anshor, menganggap program sertifikasi ulama sebagai langkah yang kurang tepat

karena berpotensi menyesatkan pandangan kelompok lain atau bahkan berbeda pandangan yang kemudian seolah-olah menyebabkan pandangan menyalahkan terhadap salah satu dia serta merasa yang paling benar yang justru itulah yang sebenarnya berbahaya

- d. Skrip: Standarisasi dai (what) yang diinisiasi oleh MUI (who) adalah bertujuan untuk mencetak ulama-ulama berkualitas dan nonradikal (why). Standarisasi dilakukan di Indonesia oleh karena kebebasan penceramah dalam berdakwah seperti diungkap Cholil Nafis pada Rabu 20/11/2019 (when). Sertifikasi dai pada gelombang pertama pada Senin (18/11) melibatkan sebanyak 75 ulama (who) yang telah mengikuti proses sertifikasi.
- e. Retoris:BBC.com menggunakan kata “ulama senior” pada yang terlibat dalam mensukseskan kebijakan MUI. Penggunaan kata ulama senior tersebut merujuk kepada Wakil Ketua Majelis Tablig PP Muhammadiyah Fahmi Salim, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Muchlis Hanafi, hingga pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Depok yakni, Hamdan Rasyid. Sertifikat yang diberikan oleh MUI kepada peserta sertifikasi dai yang lolos tes dinamai sertifikat negara. Penandatanganan pada pakta integritas ulama oleh peserta yang lolos tes, BBC.com menggunakan kata wajib yang berarti bahwa dai yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan tapi tidak sesuai dengan pakta integritas maka mereka dianggap melenceng akan dijatuhi sanksi. Penggunaan kata dijatuhi sanksi dalam portal berita ini diganti dengan kata ditarik. Kata ditarik (tarik) yang digunakan ini mengesankan paksaan berbeda makna kalau ditarik itu diganti dengan kata diminta (minta) kembali. Kata-kata tarik lebih menekankan MUI lebih memiliki wewenang sedang kata minta lebih menunjukkan pesan bahwa MUI dan dai bersertifikat berada dalam strata yang sama.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis framing Zhongdang dan Kosicki tentang standarisasi dai yang disajikan oleh tiga media online menunjukkan bahwa:

1. Tempo.co mbingkai penting adanya kebijakan MUI dalam menciptakan dai yang mencerahkan. Apalagi di tengah munculnya penceramah-penceramah baru yang kapasitas keagamaannya masih diragukan sebab jangan sampai ajaran Agama disampaikan oleh individu-individu yang *background* keilmuannya belum teruji. Seperti Kita Perlu Dakwah Yang Mencerahkan : MUI Luncurkan Standardisasi Da'i.

2. Adapaun Medcom.id dalam membingkai kebijakan MUI atas berita standarisasi ulama lebih menekankan dan menunggu adanya dukungan dari organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Sebab, di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sudah dipercaya sebagai ormas Islam yang kompeten di bidang Agama dan kebangsaan. Sebagaimana judul berita MUI Pastikan NU dan Muhammadiyah Ikut Standarisasi Dai.
3. Sementara BBC.com lebih mempersoalkan tolok ukur apa yang akan digunakan oleh MUI dengan sertifikasi dai. Ketidak-jelasan tolok ukur hanya akan memicu stigma negative terhadap MUI sebagai *state apparatus* sekaligus tidak dianggap asal menjiplak dari Negara-negara yang sudah melakukan sertifikasi dai sehingga judul berita BBC.com berbunyi Sertifikasi Ulama MUI: Upaya Mencetak Dai Nonradikal, Dengan Tolok Ukur Yang Dianggap 'Belum Jelas'.

Daftar Pustaka

Mengandung minimal 15 sumber referensi yang relevan
Terdiri dari 60 % jurnal ilmiah
80 % referensi tidak lebih dari masa 10 tahun
Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan manajer aplikasi
(mendeley, zotero, dll) atau kutipan dari google cendekia

Contoh daftar pustaka

- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi, Cet Ke-3*. Jakarta: Kencana.
- D. Reese, Stephen. 1991. *Setting the Media's Agenda: A Power Balance Perspective*. Beverly Hills: Sage.
- Nusa, Lukman. 2010. "Halaman Muka Majalah Tempo (Studi Analisis Isi Perbedaan Halaman Muka Representasi Tajuk Utama Majalah Tempo Edisi Tahun 1993/1994 Dengan Tahun 2009/2010)." *Profetik: Jurnal Komunikasi* Volume 09, : No 01.
- Raharjo, Sumantri R. 2015. *Media Relations Di Media Massa (Analisis Deskriptif Kualitatif Terhadap Kegiatan Media Relations TVRI Jogja TV)*. Yogyakarta: Profetik Jurnal Komunikasi Vol 8 No 2.

A.